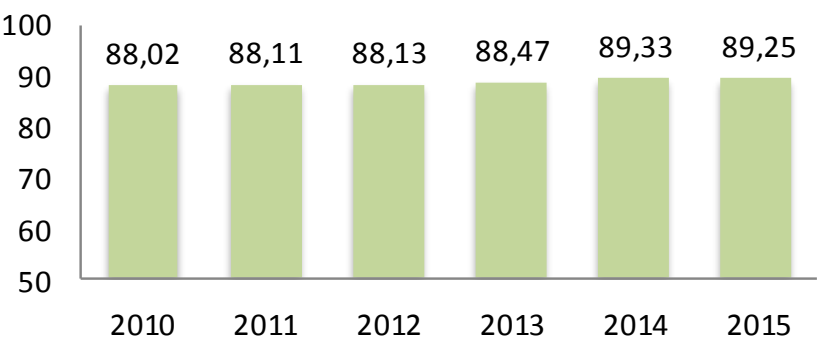


## Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### 1. Pencapaian Pembangunan Gender (IPG)

Terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender (KKG) ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Ukuran yang dipakai adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), melalui IPG perbedaan pencapaian yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dapat menjelaskan sedangkan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan di bidang politik maupun di bidang manajerial adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Kedua ukuran tersebut diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan gender dan keadilan gender yang dicapai melalui program-program pembangunan.

Pencapaian IPG Kalimantan Tengah 2010-2015



Salah satu tujuan dari pembangunan di Kalimantan Tengah adalah adanya pemerataan hasil pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh penduduk Kalimantan Tengah. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan tujuan tersebut mampu diwujudkan secara berkesinambungan. Namun demikian, kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota belum sepenuhnya bisa dihindari. Katingan dan Murung Raya merupakan kabupaten dengan nilai IPG 2015 terendah dengan capaian 84,78 dan 82,31 dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Tengah seperti yang terlihat pada Gambar dibawah

Pencapaian IPG menurut Kabupaten/Kota  
di Kalimantan Tengah, 2010-2015

NO	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kotawaringin Barat	84,75	85,39	86,63	86,87	90,04	90,04
2	Kotawaringin Timur	81,9	81,98	82,08	82,09	86,07	86,79
3	Kapuas	92,92	93,49	94,51	95,04	95,36	95,65
4	Barito Selatan	92,09	92,77	92,95	93,21	93,46	93,34
5	Barito Utara	81,73	82,02	84,83	85,22	85,5	85,62
6	Sukamara	85,95	86,55	87,91	89,61	90,14	90,09
7	Lamandau	89,66	90,33	90,74	90,87	91,06	91,55
8	Seruyan	87,83	87,93	88,13	88,13	88,87	88,42
9	Katingan	81,48	83,41	83,61	83,86	83,88	84,78
10	Pulang Pisau	85,46	85,89	86,83	88,73	90,27	90,25
11	Gunung Mas	81,57	84,9	88,16	90,99	91,8	92
12	Barito Timur	86,37	86,5	86,79	87,38	87,75	88,16
13	Murung Raya	79,86	80,46	80,97	80,99	81,53	82,31
14	Kota Palangka Raya	91,94	92,84	93,22	93,56	93,8	94,3
15	KALIMANTAN TENGAH	88,02	88,11	88,13	88,47	89,33	89,25
	Nasional		89,52	90,07	90,19	90,34	91,03

Padahal kabupaten tersebut mempunyai potensi sumberdaya alam yang masih banyak belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan. Banyak faktor yang menyebabkan ketertinggalan tersebut antara lain adalah kurangnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar ekonomi, terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia serta kendala geografis yang relatif masih sulit merupakan masalah utama bagi pengembangan pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah.

2. Pencapaian Pemberdayaan Gender (IDG)

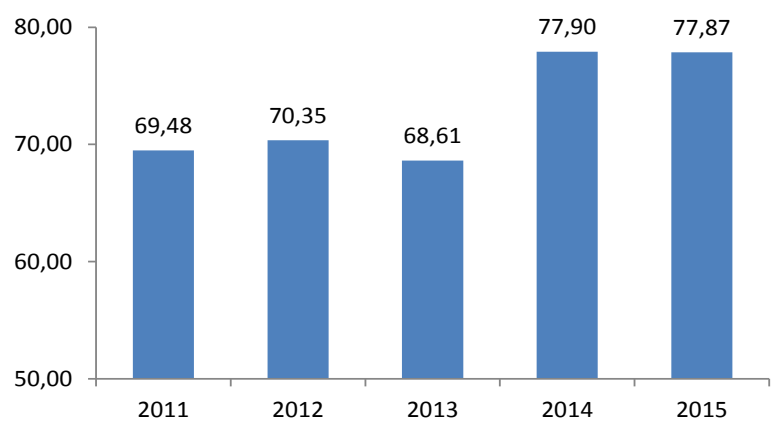
Kesetaraan dan keadilan gender sering dimaknai sebagai suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi,seimbang dan harmonis, tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan. Makna dari kesetaraan gender bukan hanya persoalan pencapaian persamaan status dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki,tetapi juga dapat bermakna sebagai persoalan pencapaian persamaan peranan. Maksud dari persamaan peran disini adalah perempuan memiliki peranan yang proposional dalam hal: proses pengambilan keputusan dibidang politik, penyelenggaraan pemerintahan, dan kehidupan ekonomi,khususnya kontribusi perempuan dalam pendapatan rumah tangga.

Pencapaian Pemberdayaan Gender,unsur persamaan peranan tersebut merupakan komponen/indikator yang tercakup dalam pengukuran IDG. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, IDG merupakan ukuran komposit yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi.Gambar 2.4

menggambarkan tren IDG Kalimantan Tengah sejak tahun 2011-2015 yang terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011, IDG Kalimantan Tengah sebesar 69,48 meningkat menjadi 70,35 pada tahun 2012. Namun pada angka ini mengalami penurunan menjadi 68,61 pada tahun 2013 dan kemudian meningkat lagi menjadi 77,90 pada tahun 2014 dan 77,87 pada tahun 2015. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi semakin menuju ke arah yang lebih baik terlihat dari semakin meningkatnya kesetaraan peran gender meskipun masih terdapat dinamika yang menunjukkan penurunan capaian. Dengan demikian, peranan perempuan semakin strategis dibanding sebelumnya. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai peranan perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan, perlu dikaji setiap komponen IDG secara lebih mendalam.

IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu: 1) Keterwakilan perempuan dalam parlemen; 2) Perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknis; dan 3) sumbangan pendapatan.

Pencapaian IDG Kalimantan Tengah 2011-2015



Pembangunan nasional yang dilaksanakan tidak hanya bertujuan meraih pertumbuhan setinggi-tingginya, namun juga memperhatikan pemerataan antar wilayah. Hal ini sering disebut sebagai growth with equity, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden RI nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Dengan demikian, kajian-kajian maupun pengukuran yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan diharapkan senantiasa menyajikan perbandingan antar wilayah, baik pada level provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun desa. Dengan demikian, apabila ditemukan adanya kesenjangan yang besar antar wilayah, maka

pemerintah dapat dengan segera melakukan evaluasi dan perencanaan terhadap pelaksanaan pembangunan yang lebih tepat.

Namun hingga saat ini, apabila berbicara dikotomi pembangunan antara wilayah kabupaten/kota masih ditemukan adanya kesenjangan yang relatif cukup besar.Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan diwilayah kabupaten/kota adalah terkait dengan kondisi alam yang cukup berat dan kurang tersedianya infrastruktur yang memadai, terutama di daerah-daerah pedalaman, sehingga masih terdapat daerah-daerah yang terisolir (BPS, 2001). Ketertinggalan ini juga berdampak pada kesenjangan pemberdayaan gender antar wilayah kabupaten/kota, yang masih menjadi catatan pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Kesenjangan pemberdayaan gender antar wilayah kabupaten/kota di Kalimantan tengah dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut.

Pencapaian IDG Menurut Kabupaten/Kota  
di Kalimantan Tengah 2011-2015

NO	Kabupaten/ Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
		2011	2012	2013	2014	2015
7	Lamandau	49,31	50,45	51,76	54,65	53,55
9	Katingan	64,16	64,71	69,48	62,33	60,79
6	Sukamara	58,55	59,58	63,32	60,27	61,24
1	Kotawaringin Barat	58,96	60,92	60,75	64,48	63,98
13	Murung Raya	58,71	59,15	59,9	65,16	65,82
3	Kapuas	55,99	58,94	61,9	62,46	68,21
10	Pulang Pisau	67,22	66,51	68,44	69,38	69,32
8	Seruyan	63,33	62,32	64,71	69,47	69,7
2	Kotawaringin Timur	60,82	60,27	61,34	69,91	70,23
12	Barito Timur	65,23	66,16	65,7	66,01	75,8
14	Kota Palangka Raya	62,39	63,35	67,51	79,59	79,83
11	Gunung Mas	83,08	81,58	78,29	81,01	79,98
4	Barito Selatan	76,98	76,95	77,43	84,02	83,88
5	Barito Utara	78,56	78,91	76,18	83,51	84,35
15	Provinsi Kalimantan	69,48	70,35	68,61	77,9	77,87
	Nasional	69,14	70,07	70,46	70,68	70,83

Pada tahun 2014 dan 2015 hanya terdapat 4 Kabupaten/Kota yang memiliki nilai IDG di atas rata-rata provinsi.Jumlah ini naik dibanding tahun 2013 yang tercatat sebanyak 3 kabupaten/kota. Keempat kabupaten/kota dengan capaian IDG di atas rata-rata provinsi tersebut adalah Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara.Sementara kabupaten dengan IDG terendah tahun 2015 adalah Kabupaten Lamandau.

IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu: 1) Keterwakilan perempuan dalam parlemen; 2) Perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknis; dan 3) sumbangan pendapatan. Besaran nilai indikator yang terekam dari kegiatan pengumpulan data (survei) merupakan hasil akumulasi dari berbagai kebijakan baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Hasilnya menggambarkan kondisi terkini (riil) peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan.

**3. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Korban Kasus KDRT, Non KDRT, dan Trafiking yang melapor, ditangani, dan diselesaikan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)**

Dalam rangka akselerasi terwujudnya pemberdayaan perempuan dan anak melalui ketersediaan wadah kegiatan layanan fisik, informasi , rujukan, konsultasi dan advokasi bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan maka telah terbentuk P2TP2A di Provinsi Kalimantan Tengah yang telah terbentuk di 14 Kabupaten/Kota sebagai berikut :

**Daftar P2TP2A di Provinsi Kalimantan Tengah**

No.	Kabupaten / Kota	Dasar Pembentukan
1.	Provinsi Kalimantan Tengah	Nomor : 188.44/139/2014
2.	Kota Palangka Raya	Nomor : 54 TAHUN 2013
3.	Kabupaten Barito Utara	Nomor : 188.45/427/2012
4.	Kabupaten Barito Selatan	Nomor : 260 TAHUN 2015
5.	Kabupaten Murung Raya	Nomor : 188.45/412.a/ Tahun 2013
6.	Kabupaten Barito Timur	Nomor : 448 TAHUN 2013
7.	Kabupaten Kotawaringin Barat	Nomor : 476/18.B/BPPKB/VII/2012
8.	Kabupaten Kotawaringin Timur	Nomor : 188.45/539/HUK-BPPKB/2013
9.	Kabupaten Seruyan	Nomor : 232 TAHUN 2011
10.	Kabupaten Murung Raya	Nomor : 188.45/412.a/ Tahun 2013
11.	Kabupaten Kapuas	Nomor : 562/BPPKB TAHUN 2014
12.	Kabupaten Lamandau	Nomor : 188.45/483/XI/HUK/2014
13.	Kabupaten Seruyan	Nomor : 232 TAHUN 2011
14.	Kabupaten Gunung Mas	Nomor : 364 TAHUN 2015
15.	Kabupaten Pulang Pisau	Sudah terbentuk namun belum ada SK Pembentukan

Dalam usaha menekan angka kekerasan dan meningkatkan pelayanan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah juga telah terbentuk beberapa kesepakatan bersama sebagai berikut :

- Kesepakatan Bersama antara Ketua Tim Penggerak PKK dengan Kepala Badan Pemberayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga

Berencana Provinsi Kalimantan Tengah nomor : 109/Skr/PKK Prov/XI/2014, Nomor : 479/Sekr-BP3AKKB/XI/2015 tentang Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Tengah

- Kesepakatan Bersama antara Ketua Tim Penggerak PKK Kab/Kota se Kalimantan Tengah dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana se Kalimantan Tengah tentang Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- Kesepakatan Bersama antara Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah nomor : 486/Sekr-BP3AKKB/XI/2014, Nomor : 460/2668/DINSOS.IV tentang Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya sesuai dengan salah satu tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan dan perdagangan orang, maka salah satu sasaran yang dilakukan adalah meningkatkan pelayanan penanganan korban kekerasan dan perdagangan orang. Pelayanan tersebut meliputi penanganan kasus pengaduan, penanganan kekerasan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi. Layanan terhadap korban tindak kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada data berikut :

**Data Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan**

Bentuk Kekerasan	2012	2013	2014	2015
KDRT	63	151	130	60
Pelecehan Seksual	6	37	19	1
Bunuh Diri	1	6	3	0
Eksplorasi Seksual	0	4	0	1
Aborsi	0	1	0	2
Pencurian	0	8	16	0
Perzinahan	12	20	32	5
Perdagangan Perempuan	0	1	2	2
Perkosaan	4	19	15	0
Penelantaran Dalam Rumah Tangga	7	8	14	2
JUMLAH	93	255	231	73

**Data Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak**

Bentuk Kekerasan	2012	2013	2014	2015
------------------	------	------	------	------

Persetubuhan Terhadap Anak	26	111	75	26
Perbuatan Cabul Terhadap Anak	4	21	32	8
Perkosaan Terhadap Anak	5	19	14	1
Penganiayaan Terhadap Anak	1	31	38	18
Perbuatan Asusila Anak	7	2	4	1
Perdagangan Anak (Trafficking) /pencurian	2	2	10	2
Pornografi dan Pornoaksi	0	0	0	0
Bawa Lari Anak	3	8	14	2
Adopsi Anak	2	0	1	0
Perebutan Hak Asuh Anak	5	4	4	4
<b>JUMLAH</b>	<b>55</b>	<b>198</b>	<b>192</b>	<b>62</b>

4. **Capaian Indikator Kinerja Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Berdasarkan tugas dan fungsi dan kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur nomor 30 tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana.

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu cara adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

**Daftar Jumlah Akseptor KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota dan Pemakaian Alat Kontrasepsi di Provinsi Kalimantan Tengah, 2015**

Kabupaten / Kota	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif							Jumlah
		IUD	MOW	MOP	Kondom	Implan	Suntikan	Pil	
Kotawaringin Barat	48.505	1.015	758	140	1.044	3.175	19.174	19.174	44.480
Kotawaringin Timur	81.786	1.133	1.037	144	1.660	8.933	29.200	29.200	71.307
Kapuas	77.373	942	758	124	1.313	9.532	26.173	26.173	65.015
Barito Selatan	26.484	13	139	8	192	2.605	8.811	8.811	20.579
Barito Utara	25.255	244	90	32	280	1.410	8.536	8.536	19.128
Sukamara	35.704	271	86	16	1.242	3.115	13.829	13.829	32.388
Lamandau	24.452	1.079	51	18	828	3.020	8.234	8.234	21.464
Seruyan	15.713	1.011	21	1	99	5.71	7.194	7.194	16.091
Katingan	14.081	178	90	64	82	1.087	7.082	7.082	15.665
Pulang Pisau	25.700	69	15	5	522	2.504	11.331	11.331	25.777
Gunung Mas	16.162	711	361	30	971	1.281	6.280	6.280	15.914
Barito Timur	22.541	143	75	10	325	1.034	9.671	9.671	20.929
Murung Raya	17.938	241	187	4	188	1.086	5.995	5.995	13.696
Palangka Raya	51.967	3.715	477	22	1.404	2.008	19.613	19.613	46.852
<b>Jumlah</b>	<b>483.661</b>	<b>10.765</b>	<b>4.145</b>	<b>618</b>	<b>10.150</b>	<b>41.361</b>	<b>181.123</b>	<b>181.123</b>	<b>429.285</b>
<b>2014</b>	<b>462.048</b>	<b>6.825</b>	<b>3.995</b>	<b>716</b>	<b>10.815</b>	<b>40.242</b>	<b>170.020</b>	<b>120.709</b>	<b>353.322</b>
<b>2013</b>	<b>407.823</b>	<b>7.838</b>	<b>4.184</b>	<b>641</b>	<b>10.405</b>	<b>37.598</b>	<b>167.208</b>	<b>127.622</b>	<b>355.496</b>

2012	393.722	11.710	4.259	635	9.876	40.452	161.224	127.301	355.403
2011	429.953	7.105	3.768	529	9.008r)	31.327	142.569	129.788	324.094')
2010	...	7.327 ')	3.658 ')	489 ')	7.170')	33.310')	149.746')	133.759')	335.459')

Berdasarkan Undang-undang No 10 Tahun 1992, keluarga di Indonesia dapat dibagi berdasarkan tingkat kesejahteraannya, dan untuk melakukan pembagian tersebut diperlukan indikator-indikator yang sifatnya valid, sederhana dan mudah diamati sekalipun oleh kader-kader di desa yang umumnya pengetahuannya masih sederhana. Berikut ini merupakan pembagian keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan serta indikator yang menjadi syarat atau ukurannya:

1. Keluarga Pra- Sejahtera

Keluarga Pra-Sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya. Adapun indikatornya yaitu ada salah satu atau lebih dari indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) yang belum terpenuhi.

2. Keluarga Sejahtera Tingkat I (KS I)

Keluarga Sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar. Indikatornya adalah sebagai berikut :

- Anggota keluarga melaksanakan ibadah
- Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
- Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian
- Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah
- Bila anak sakit dibawa ke sarana/petugas kesehatan atau diberi pengobatan modern.

3. Keluarga Sejahtera Tingkat II (KS II)

Keluarga Sejahtera II (KS II) adalah keluarga yang selain dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, juga dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya. Indikator yang digunakan adalah lima indikator pertama pada indikator Keluarga Sejahtera I (indikator 1-5), serta ditambah indikator sebagai berikut :

- Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianutnya masing-masing
- Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk
- Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru setahun terakhir.
- Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap penghuni rumah



- Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugasnya masing-masing
- Paling kurang satu anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas telah memiliki pekerjaan tetap
- Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun telah mampu membaca tulisan latin
- Seluruh anak yang berusia 6-15 tahun sedang bersekolah saat ini
- Anak hidup paling banyak 2 orang, atau bila anak lebih dari 2 orang maka keluarga yang masih merupakan pasangan usia subur (PUS) sedang menggunakan kontrasepsi saat ini

#### 4. Keluarga Sejahtera Tingkat III (KS III)

Keluarga Sejahtera III (KS III) adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologisnya, dan sekaligus juga dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, namun belum aktif dalam usaha kemasyarakatan dalam lingkungan desa atau wilayahnya. Apapun indikator yang harus dipenuhi yaitu indikator 1-14 pada Keluarga Sejahtera II serta ditambah indikator sebagai berikut:

- Upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama
- Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga
- Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari
- Keluarga biasanya ikut seraya dalam kegiatan masyarakat dalam lingkungan tepat tinggal
- Keluarga mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang sekali dalam tiga bulan
- Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/majalah
- Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat

#### 5. Keluarga Sejahtera Tingkat III Plus (KS III Plus)

Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan dasar psikologis, kebutuhan pengembangan, dan sekaligus secara teratur ikut menyumbang dalam kegiatan sosial dan aktif mengikuti gerakan semacam itu. Adapun syarat agar dapat dikatakan sebagai Keluarga Sejahtera III Plus adalah mampu memenuhi indikator 1-21 ditambah indikator sebagai berikut :

- Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi
- Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, atau institusi masyarakat lainnya

**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi capaian tahun ke -					Rasio capain pada tahun ke -				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>																		
11,1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	*	*	*	1,87	1,89	1,92	1,94	1,96	7,19	8,31	9,14	8,49	8	384,49	439,68	476,04	437,63	408,16
11,2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	*	*	*	33,1	33,12	33,14	33,16	33,18	11,04	9,71	12,59	33,16	15,18	33,35	29,32	37,99	100,00	45,75
11,3	Rasio KDRT	*	*	*	0,0012	0,001	0,008	0,006	0,006	0,0054	0,0106	0,0066	0,0106	0,0306	450,00	1060,00	82,50	176,67	510,00
11,4	Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur (%)	*	*	*	0,55	0,53	0,51	0,49	0,49	0,56	0,58	*	*	0,11	101,82	109,43	#####	#####	22,45
11,5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	*	*	*	34,95	34,97	34,99	35,02	35,04	56,16	51,2	48,94	33,91	35,66	160,69	146,41	139,87	96,83	101,77
11,6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak	*	*	*	100	100	100	100	100	139	106	189	123	135	139,00	106,00	189,00	123,00	135,00
	<b>12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>																		
12,1	Rata-rata jumlah Anak per keluarga	*	*	*	0,76	0,73	0,7	0,7	0,7	1,06	1	1	0,8	1,1	139,47	136,99	142,86	114,29	157,14
12,2	Rasio Akseptor KB	*	*	*	22,75	22,77	22,79	22,81	22,82	79,28	74,69	77,15	76,47	78,19	348,48	328,02	338,53	335,25	342,64
12,3	Cakupan peserta KB aktif (orang)	*	*	*	313,859	345,241	379,765	384,547	353,322	394,460	355,421	384,547	353,322	376,606	125,68	102,95	101,26	91,88	106,59
12,4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	*	*	*	181,901	172,805	164,165	188,555	188,730	209,279	194,108	188,555	188,730	183,937	115,05	112,33	114,86	100,09	97,46